

BAB I

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Republik Suriname adalah sebuah negara di Amerika Selatan dan merupakan bekas jajahan Belanda. Negara ini berbatasan dengan Guyana Perancis di timur dan Guyana di barat. Di selatan berbatasan dengan Brasil dan di utara dengan Samudra Atlantik. Dapat diketahui bahwa pada tanggal 25 Mei 2005, Suriname menggelar pemilihan umum untuk memilih presiden dan anggota parlemen.¹

Pemerintahan Suriname pada tanggal 25 Februari 1980 telah terjadi kudeta, yang mana dianggap sebagai akhir dari campur tangan dari neokolonial Belanda, bagi kebanyakan warga Suriname, kudeta 25 Februari 1980 adalah kejutan besar. Suriname dan kudeta adalah sebuah kombinasi yang tak terbayangkan. Keadaan di bekas jajahan Belanda, yang baru lima tahun merdeka sebagai republik Suriname,. Memang serikat buruh militer dengan pemerintah yang angkuh berselisih berat. Namun tidak seorang pun menyangka militer akan melancarkan kudeta.

Seperti yang kita ketahui sejarah dari Suriname diatas , bahwa pemerintahan Suriname lahir dari sebuah kudeta, bahwa yang melakukan kudeta ini dari pihak militer, pengaruh militer di pemerintahan Suriname sangat besar, tetapi rakyat yakin pada tanggal 25 Mei 2005 militer tidak akan melancarkan

kudeta, Tapi ulah pemerintah sekarang sangat mirip dengan ulah para penguasa sebelum tahun 1980. Ini bisa menjelaskan popularitas Desi Bouterse, pemimpin kudeta 25 tahun silam. Bouterse tetap disukai, walaupun pengadilan sudah memvonisnya karena penyelundupan narkoba dan pelanggaran hak-hak azasi manusia.

Alasan yang lain adalah dengan mengetahui bagaimana masa depan demokrasi di Suriname tersebut kita dapat mengetahui bagaimana perjalanan demokrasi di Suriname hingga bisa mendapat kemenangan pada pemilu pada tahun 2005, apakah militer masih mempunyai pengaruh kuat untuk memberikan kemenangan terhadap Desi Bouterse lagi dalam pemilihan umum 2005 ini.

B. Tujuan Penelitian

1. Menambah pemahaman tentang Politik Dalam Negeri Negeri Republik Suriname yang terjadi perubahan sejak kudeta oleh pihak militer
2. Untuk mengaplikasikan Ilmu dan Teori-teori yang diperoleh selama kegiatan perkuliahan dan menyesuaikan dengan permasalahan yang diambil
3. Sebagai syarat meraih gelar kesarjanaan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Universitas

C. Latar Belakang Masalah

Republik Suriname adalah sebuah negara di Amerika Selatan dan merupakan bekas jajahan Belanda. Negara ini berbatasan dengan Guyana Perancis di timur dan Guyana di barat. Di selatan berbatasan dengan Brasil dan di utara dengan Samudra Atlantik.

Lambang negara Suriname digambarkan dalam bentuk dua orang Amer-Indian yang memegang busur panah dan mengapit sebuah perisai berbentuk oval, berdiri di atas pita dengan tulisan *Justitia Pietas, Fides*.

Tergambar dalam perisai tersebut, di sisi kiri sebuah kapal layar dan di sisi sebelah kanan sebuah pohon sejenis palm. Kedua gambar tersebut dipisahkan oleh garis vertikal mengikat sebuah segi empat belah ketupat tepat di tengah perisai, dan di dalam segi empat belah ketupat tersebut tergambar bintang segi lima.

Suriname berpenduduk sekitar 500 ribu orang, tetapi mempunyai 10 partai politik dan berbagai koalisi yang memperebutkan 51 kursi majelis nasional. Mayoritas partai didirikan berdasarkan suku etnis. Suriname adalah negara multi kultural dan para politisi selalu mengaitkan perolehan kekuasaan dengan suku mereka. Ada partai Hindustan, partai Jawa, partai Kreol dan partai Negro. Tujuan utama koalisi adalah menyatukan sebanyak mungkin suku etnis.

Pada tanggal 25 Februari 1980, 16 orang perwira militer rendah Tentara Nasional Suriname mengambil alih kekuasaan negeri itu. 25 tahun kemudian, kudeta militer itu sudah hampir dilupakan orang. Hanya partai politik pimpinan Desi Bouterse, dalam kudeta waktu itu, masih tetap menilai peristiwa 25 tahun

lalu sebagai peristiwa herois. Kudeta dianggap mengakhiri campur tangan neokolonial Belanda. Karena itu Desi Bouterse menyebut peristiwa ini 'revolusi' tahun 1980.

Kudeta ini membawa Suriname dalam keadaan yang memprihatinkan, pada masa kepemimpinan Desi Bouterse perekonomian Suriname tidak bisa berkembang diakibatkan pemutusan hubungan bantuan ekonomi dari Belanda, sektor ekonomi lumpuh dan tidak berkembang sama sekali.

Bagi kebanyakan warga Suriname, kudeta 25 Februari 1980 adalah kejutan besar. Suriname dan kudeta adalah sebuah kombinasi yang tak terbayangkan. Keadaan di bekas jajahan Belanda, yang baru lima tahun merdeka sebagai republik Suriname, tenang-tenang saja. Memang serikat buruh militer dengan pemerintah yang angkuh berselisih berat. Namun tidak seorang pun menyangka militer akan melancarkan kudeta.

Pecahnya Perang Dunia Pertama tidak mempengaruhi situasi ekonomi - politik Suriname. Pada tanggal 15 Desember 1954, pemerintah Belanda bersama beberapa wakil dari Suriname menandatangani sebuah memorandum yang isinya rencana pengakhiran penjajahan. Dalam sebuah Konferensi Meja Bundar pada tahun 1961, para wakil Suriname yang dipimpin oleh Perdana Menteri Pengel menuntut dibentuknya sebuah pemerintahan sendiri. Tuntutan itu semakin menjadi setelah didirikannya beberapa parpol yang dibentuk pada dasawarsa itu, semakin gencar menyampaikan tuntutan agar Suriname diberikan kebebasan

Tuntutan ini ditanggapi secara serius dengan diadakannya sebuah konferensi di Belanda pada tahun 1970. Konferensi ini diadakan untuk membicarakan persiapan pelepasan Suriname sekaligus menyusun kabinet yang terdiri dari wakil-wakil partai. Suriname selanjutnya menjadi negara merdeka sejak tanggal 25 Nopember 1975. Walaupun demikian, perekonomian negara yang baru merdeka ini tetap sangat tergantung pada bantuan pembangunan Belanda.²

Pada tanggal 25 Pebruari 1980, lima tahun setelah kemerdekaannya, Suriname diguncang oleh kudeta yang dilancarkan pihak militer. Peristiwa kudeta ini telah mengakibatkan jatuhnya Pemerintah Demokrasi Parlementer pertama sejak kemerdekaan Suriname. Situasi menjadi semakin panas dengan tampilnya penduduk suku Bushnegro dan Amerindian yang tinggal di daerah-daerah pedalaman, sebagai penentang utama kekuasaan militer. Sekitar 35.000 penduduk Bushnegro dan 6500 Amerindian telah menjadi pelaku utama pemberontakan terhadap penguasa militer.

Kelompok-kelompok militan dari kedua golongan itu adalah kelompok Mandela (Bushnegro) di bawah pimpinan mantan anggota militer Ronny Bruswijk dan kelompok Tukayana Amazonas (Amerindian). Sebagai reaksi terhadap pemberontakan tersebut, pada tanggal 8 Desember 1982 pihak militer melakukan penembakan terhadap 15 tokoh demonstran.

Peristiwa ini telah mengakibatkan dihentikannya bantuan pembangunan Belanda kepada Suriname, yang berdampak semakin buruknya kondisi

² *Sejarah Singkat Republik Suriname*, KBRI Paramaribo,

perekonomian Suriname. Puncak dari konflik bersenjata tersebut terjadi pada tahun 1986, yaitu ketika Pihak Militer terpaksa harus berhadapan dengan pemberontak Bushnegro yang telah bersatu dan menamakan dirinya *Jungle Commando*. Sementara itu, dalam tahun yang sama kelompok Amerindian juga meningkatkan aksi pemberontakannya. Kemelut ini telah mengakibatkan sekitar 7000 orang Bushnegro melarikan diri ke Cayenne (Guyana Perancis) dan meminta suaka politik kepada pemerintah setempat.

Pemerintah militer diakhiri dengan penyelenggaraan Pemilihan Umum pada bulan November 1987, yang telah mengembalikan kekuasaan pemerintah kepada golongan sipil. Namun demikian, pemerintahan hasil pemilu ini tidak berjalan lama. Pada bulan Desember 1990, pihak militer kembali melancarkan kudeta tidak berdarah yang dikenal dengan sebutan Kudeta Telepon. Akibatnya pemerintah yang demokratis kembali lumpuh. Pihak militer kemudian membentuk Pemerintah Sementara yang salah satu tugasnya adalah mempersiapkan Pemilihan Umum yang demokratis.

Pada bulan Mei 1991, Pemerintah Sementara telah berhasil menyelesaikan tugasnya, yaitu dengan diselenggarakannya Pemilihan Umum, namun hasilnya tidak sesuai dengan harapan militer, karena kemenangan berada di tangan golongan sipil.

Pada bulan September tahun yang sama, telah terbentuk pemerintah yang baru dan Drs. P. P. Venetiaan terpilih sebagai Presiden dan dengan demikian

Pada tanggal 25 Mei 2005, Suriname menggelar pemilihan umum untuk memilih presiden dan anggota parlemen. Rakyat yakin militer tidak akan kembali melancarkan kudeta. Tapi ulah pemerintah sekarang sangat mirip dengan ulah para penguasa sebelum tahun 1980. Ini bisa menjelaskan popularitas Desi Bouterse, pemimpin kudeta 25 tahun silam. Bouterse tetap disukai, walaupun pengadilan sudah memvonisnya karena penyelundupan narkoba dan pelanggaran hak-hak azasi manusia.³

Suriname telah memiliki pemerintahan baru., yaitu dimenangkan oleh Ronald Venetiaan dengan melalui pengambilan suara di dalam Parlemen, setelah 2/3 suara tidak bisa diraih oleh partai New Front, maka dilakukan *reelection* didalam Parlemen sekitar 800 orang memilih langsung calon presiden Suriname, pada bulan septembet 2005, Ronald Venetiaan kembali terpilih untuk ketiga kalinya sebagai Presiden Suriname yang berasal dari golongan sipil.

D. Perumusan Masalah

Dengan melihat latar belakang yang telah dikemukakan diatas maka penulis dapat mengajukan suatu permasalahan yang akan dibahas yaitu :
“Bagaimana Masa Depan Demokrasi di Suriname Pasca Pemilu Parlemen 2005?”

³ Henk Hendriks, *Suriname Menggelar Pemilu Parlemen*, 25 Mei 2005, Radio Nederland Wereldwijd, http://www.radio.nl/arsipakustik/amerika/pelelu_suriname050525 akses 23 Juli

E. Tujuan Penulisan

1. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh masa depan demokrasi sebuah Negara yang pernah terjadi sebuah kudeta dari pihak militer, dengan contoh Negara Suriname yang dari awal pemerintahan telah dipimpin oleh sebuah rejim dari kudeta Desi Bouterse
2. Sebagai sarana pendalaman terhadap ilmu pengetahuan yang selama ini menjadi perhatian / concern mahasiswa Ilmu Hubungan Internasional.
3. Sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Politik dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

F. Kerangka Dasar Teori

Dari permasalahan yang terjadi di Suriname, dapat kita lihat bahwa di Suriname telah menerapkan konsolidasi demokrasi sesuai apa yang dikemukakan oleh penganut teori Konsolidasi Demokrasi.

Teori Konsolidasi Demokrasi tersebut menurut Larry Diamond , konsolidasi demokrasi merupakan persoalan merawat stabilitas dan persistensi demokrasi. Dia menekankan proses pencapaian legitimasi yang luas dan dalam, sehingga semua aktor politik yang signifikan, pada level elite maupun massa, percaya bahwa rezim demokratis adalah yang paling benar dan tepat bagi masyarakat mereka, lebih baik ketimbang alternatif realitis lain yang bisa mereka bayangkan. Konsolidasi memerlukan lebih dari suatu komitmen pada demokrasi secara abstrak, bahwa demokrasi pada prinsipnya adalah bentuk terbaik pemerintahan. Rasi Diamond konsolidasi demokrasi melibatkan bukan hanya

kesepakatan pada aturan-aturan untuk bersaing memperrebutkan kekuasaan tetapi juga pembatas-pembatas yang fundamental dan ditegakkan sendiri (*self-enforcing*) pada penerapan kekuasaan. Menurut Diamond ada banyak pendekatan yang meringkai konsolidasi demokrasi.⁴

Pertama, pendekatan aktor (elite). Diamond memberikan rekomendasi normatif bahwa konsolidasi demokrasi memerlukan suatu komitmen mutual di kalangan elite, lewat mekanisme koordinasi sebuah konstitusi, institusi - institusi politik terkait dan membangun pakta (kesepakatan) elite untuk menegakkan batas-batas otoritas negara, tidak peduli partai atau fraksi mana yang mengontrol negara pada waktu tertentu. Diamond juga menyarankan agar elite menghindari retorika yang dapat menghasut para pengikut mereka pada kekerasan, intoleransi, atau metode-metode ilegal. Para pemimpin politik juga tidak boleh menggunakan militer demi mencapai keunggulan politik.

Di suriname pemilu terakhir ini sudah terdapat pemerintahan yang cukup modern dan pemilu diadakan secara periodik, dengan melihat dari sejarah Suriname dimana terjadi sebuah kudeta dari pihak militer sehingga kebebasan dalam politik dibatasi, dan hak pilih rakyat tidak diperhatikan, setelah lepas dari kudeta disana dapat kita lihat partai yang menang tidak akan berusaha untuk monopoli kekuasaan dengan kemenangan mereka, selama militer tidak menggunakan kekuatan untuk menekan pemerintahan, bayang-bayang kekuatan militer masih sangat besar, demam pemilu melanda negara berpenduduk jarang ini. Tahun 1975, Suriname merdeka dari Belanda. Suriname mengenal sistim

⁴ Diamond, James. *Developing Democracy: Towards Consolidation*, hal 28. IBE Press, Yogyakarta

distrik. Lebih dari separuh penduduknya berdiam diluar dan sekitar ibukota Paramaribo. Distrik ini juga mewakili kursi terbanyak dalam Majelis Nasional. Diperlukan mayoritas dua pertiga anggota Majelis Nasional untuk memilih seorang presiden, yang kemudian akan membentuk pemerintahan baru.

Kedua, Pendekatan institusional, yaitu pentingnya institusionalisasi politik dalam proses konsolidasi demokrasi. Pendekatan ini dimaknai Diamond sebagai tiga tugas generik dalam konsolidasi : pendalaman demokrasi, institusionalisasi politik, dan mengatrol kinerja rezim. Pendalaman membuat struktur-struktur formal demokrasi menjadi lebih liberal, *accountable*, representatif, dan aksesibel. Kemajuan ke arah kebebasan dan kepatuhan hukum yang lebih besar sangat penting.

Institusionalisasi politik melibatkan konvergensi yang mapan di seputar (dan internalisasi dari) aturan dan prosedur umum persaingan dan aksi politik. Konsolidasi demokrasi harus menjawab tantangan penguatan tiga tipe institusi politik; aparat administratif negara (birokrasi); institusi representasi dan penyelenggaraan demokratis (partai politik, parlemen, dan sistem pemilihan umum); dan struktur-struktur yang menjamin akuntabilitas horisontal, konstitusionalisme, dan pemerintahan berdasar hukum, seperti misalnya sistem peradilan dan lembaga pengawasan

Larry Diamond menegaskan bahwa institusionalisasi politik adalah upaya memperkuat struktur demokrasi representatif dan pemerintahan formal sehingga menjadi lebih koheren, kompleks, otonom, mudah beradaptasi dan karenanya lebih kental, efektif, berharga, dan mengikat

Dalam sebuah Demokrasi institusi harus di pantau untuk mengetahui kinerja sebuah rezim, institusi mempunyai peran penting dalam sebuah struktur demokrasi, dalam institusi muncul kebijakan yang akan memberikan pengaruh terhadap struktur demokrasi., hasil ini dengan melihat output dari sebuah institusi di Suriname yang memberikan pengaruh terhadap kinerja sebuah rezim.

Ketiga, adalah pendekatan budaya politik. Larry Diamond melihat budaya politik sebagai variabel untuk mengetahui sejauh mana perkembangan konsolidasi demokrasi di Suriname. Diamond memberikan dukungan bagi budaya politik khususnya dalam keyakinan-keyakinan pada legitimasi demokrasi, sebagai sebuah faktor sentral dalam konsolidasi demokrasi

Literatur transisi demokratik tahun 1980-an juga cenderung memberikan sedikit perhatian pada variable budaya politik. Namun, perhatian teoritis dan empiris tahun 1990-an terhadap proses konsolidasi demokrasi (dan terhadap pertumbuhan keyakinan massa pada legitimasi demokratik sebagai elemen inti dari proses ini).membawa budaya politik memperoleh kembali suatu tempat sentral dalam studi komparatif tentang demokrasi.

Keempat, pendekatan yang berhaluan pada masyarakat. Jika uraian sebelumnya berkiblat pada masalah elite-massa dan transformasi budaya politik, dalam bab keenam Larry Diamond meletakkan konsolidasi demokrasi dalam masyarakat sipil (*civil society*). Diamond membangun argumen awal bahwa rakyat (dalam frase pemerintahan rakyat), adalah sebuah konsep yang tersebar, dan dengan mudah keliru digunakan atau disalahgunakan

Tanpa organisasi, struktur, dan prinsip-prinsip, publik mungkin tidak berarti bagi demokrasi. Sebuah publik yang aktif secara politik bukanlah segalanya yang berarti. Demokrasi, bagi Diamond juga butuh sebuah publik yang terorganisir untuk demokrasi, terisolasikan dengan norma-norma dan nilai-nilainya, dan berkomitmen bukan hanya dengan ribuan kepentingan sempitnya tetapi pada tujuan-tujuan masyarakat sipil umum lebih besar. Publik semacam ini hanya dimungkinkan dengan sebuah masyarakat sipil (*civil society*) yang bergairah.

G.Hipotesa

Berdasarkan Teori Konsolidasi Demokrasi dari Larry Diamond yang digunakan untuk mengetahui hasil pemilu di Suriname, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sementara bahwa masa depan demokrasi di Suriname akan bertambah kuat, setelah pemerintahan baru di Suriname dikuasai rezim sipil.

H.Metode Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan studi kepustakaan atau bersifat literalisasi yaitu data-data yang diperoleh berasal dari literatur dan internet, yang memuat data-data yang ada hubungannya dengan apa yang dibawah dan kemudian akan dirangkum sebagai sebuah analisa

I. Jangkauan Penelitian

Secara khusus skripsi ini hanya membicarakan periode Presiden Ronald Venetiaan

J. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab yang diuraikan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- A. Alasan Pemilihan Judul
- B. Tujuan Penelitian
- C. Latar Belakang Masalah
- D. Perumusan Masalah
- E. Tujuan Penelitian
- F. Kerangka Dasar Teori
- G. Hipotesa
- H. Metode Penelitian
- I. Jangkauan Penelitian
- J. Sistematika Penulisan

BAB II

. CAMPADAN UMUM DINAMIKA EKONOMI DAN

2. Posisi Negara Suriname

3. Pengaruh Negara Belanda Dan Amerika Terhadap Suriname

4. Pertumbuhan Perekonomian Suriname

B. Sistem Pemerintahan dan Lembaga Negara

BAB III : PROSES JATUHNYA REZIM MILITER YANG DIPIMPIN OLEH DESI BOUTERSE

A. Suriname sebelum dipimpin oleh Rezim Militer

B. Suriname pada waktu Rezim Militer yang dipimpin oleh Desi Bouterse

C. Akibat jatuhnya Rezim Militer di Suriname

BAB IV :KONSOLIDASI DEMOKRASI DI SURINAME PASCA REZIM MILITER PERIODE RONALD VENETIAAN

A. Transisi Menuju Demokrasi Di Suriname

B. Elite Politik Di Suriname

C. Institusi Politik Di Suriname

D. Budaya Politik dan Civil Society Di Suriname

E. Budaya Politik dan Civil Society Di Suriname